

**REALISASI KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERDA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19.**

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

DAFFA FAIQ MAULANA

1810012111088

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

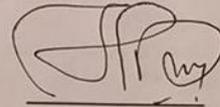
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 08/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : DAFFA FAIQ MAULANA
Nomor : 1810012111088
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Realisasi Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

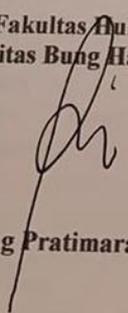
Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

**REALISASI KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERDA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19.**

Daffa Faiq Maulana¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: daffahans00@gmail.com

ABSTRACT

Perda 6 of 2020 was passed as a policy basis to reduce the spread of the Corona virus (COVID-19). The formulation of the problem: (1)How is the realization of the west sumatra provincial policy based on regional regulation number 6 of 2020 concerning the handling of covid-19? (2) What are the obstacles faced by the west sumatra provincial government in facing the new normal during the Covid-19 pandemic? (3) What efforts have the provincial government made in facing the new normal during the COVID-19 pandemic? The type of research used Sociological Juridical. Data collection techniques are obtained through the study of documents and interviews. The data are analyzed qualitatively. The results of the study: 1) the policy of the Government of West Sumatra in handling Covid 19 during the New Normal period. 2) Obstacles faced by the West Sumatra Government in handling Covid 19. 3) Efforts made by the West Sumatra Government in Handling Covid 19.

Keywords: Policy, Government, Covid 19, New Normal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Realisasi Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Menghadapi New Normal. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang perubahan dan untuk perimbangan keuangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pendistribusian dana penanggulangan Covid-19 dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Sumatera Barat

termasuk salah satu daerah yang cukup parah terdampak oleh pandemi covid-19, oleh karena itu memerlukan banyak dana untuk menanggulangi covid-19.

Coronavirus disease – 2019 (Covid-19) adalah peristiwa menyebarnya penyakit yang bersifat pandemic global. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARSCoV-2. Penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 juga merupakan upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disingkat UUKK). jakan new normal memungkinkan masyarakat mulai memasuki perkantoran, sekolah dan pusat perbelanjaan untuk mulai buka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian

Coronavirus Disease 2019. DPRD Sumatera Barat (Sumbar) telah mengesahkan rancangan perda khusus tentang adaptasi kebiasaan baru menjadi perda. Perda tersebut disahkan untuk menjadi landasan kebijakan menekan laju penyebaran virus Corona (COVID-19).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“REALISASI KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi kebijakan pemerintah provinsi sumatera barat dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19 di provinsi sumatera barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah provinsi sumatera barat dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah provinsi sumatera barat dalam mengatasi kendala-kendala dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa realisasi kebijakan pemerintah provinsi sumatera barat dalam menghadapi pandemi covid-19 di provinsi sumatera barat.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi pemerintah sumatera barat dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19.

3. Untuk menganalisa upaya apa saja yang dilakukan pemerintah provinsi sumatera barat dalam mengatasi kendala-kendala dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data didapat melalui sebuah penelitian secara wawancara langsung dengan Bapak Afnil Mahfuzi, S.H. Selaku Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Ibu Eka Fitria, SKM. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda.

2. Data Sekunder

- a) Bahan hukum primer seperti undang-undang
- b) Bahan hukum Sekunder seperti buku-buku, dokumen dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi Dokumen
- b) Wawancara

4. Analisis Data

Dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi New Normal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat keputusan agar bisa ditindak lebih lanjut. Surat Keputusan Gubernur, Nomor 360/322/BPBD-2020, tentang

Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera barat. Pada tanggal 18 April 2020, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 180/297/2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari percepatan penanganan Covid 19. Pada masa PSBB pemerintahan Sumatera Barat menerapkan kebijakan substansif dan kebijakan prosedural. Setelah PSBB tidak efektif dilakukan maka pemerintahan Sumatera Barat mengeluarkan aturan baru terkait status pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19, Dalam Perda AKB diatur penerapan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Surat bernomor 556.1/980/Dispar-Pem/X-2021 tertanggal 22 Oktober 2021 itu ditujukan kepada bupati dan wali kota di Sumbar. Surat edaran itu bertujuan untuk pencegahan Covid-19 dan optimalisasi vaksinasi di Sumbar.

B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi New Normal Pada Masa Pandemi Covid-19.

Terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintahan Sumatera Barat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid19 , yaitu :

1. Faktor Tekanan Ekonomi

Jumlah tenaga kerja di sektor informal yang relatif besar menunjukkan seberapa besar potensi jumlah tenaga kerja yang terkena dampak pandemi COVID19 dan yang kehilangan pendapatan selama masa pandemi COVID19.

2. Faktor Kekurangan Informasi

Media sosial merupakan

sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat sebagai sarana komunikasi pada masa bencana ini. Sulitnya memperoleh informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai penyebaran dan cara pencegahan, pengendalian dan penanggulangan dampak pandemi COVID19 dirasakan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab masyarakat melanggar aturan dan protokol kesehatan.

3. Faktor Sosial Budaya

Dari sekian banyak anakronisme perspektif yang beredar di masyarakat Sumatera Barat, setidaknya ada dua contoh yang paling menonjol. Pertama, anakronisme sosial budaya. Anakronisme kedua adalah konstruksi pemahaman keagamaan masyarakat Sumatera Barat yang bertentangan dengan protokol pencegahan Covid-19.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Menghadapi New Normal Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sesuai yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 pasal 8 ada wewenang Pemerintahan Daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. Melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
3. Melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
4. Melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
5. Melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan

/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau

6. Melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Realisasi kebijakan yang digunakan Pemerintahan Sumatera Barat dalam penanganan atau mencegah penyebaran covid 19 pada masa New Normal dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur, Nomor 360/322/BPBD-2020, tentang Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut Pemerintahan Sumatera Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 dirancang dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD).
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah provinsi sumatera barat dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19 mendapatkan beberapa faktor kendala yaitu faktor tekanan ekonomi, faktor kekurangan informasi, faktor sosial budaya.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala dalam menghadapi new normal pada masa pandemi covid-19 dengan melakukan sosialisasi secara merata terkait kebijakan new normal ini kepada masyarakat.. Hal lain yang dilakukan Pemerintahan Sumatera Barat dalam penanganan pencegahan Covid19 pada masa New Normal dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan

perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari yang dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Sebaiknya Pemerintah Sumatera Barat selalu menerapkan dengan tegas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut supaya masyarakat lebih peduli terhadap penanganan Covid 19, dengan cara tersebut bisa mengurangi penyebaran Covid 19.
2. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Sumatera Barat untuk mengurangi penyebaran Covid 19 sebaiknya pemerintah terlebih dahulu memecahkan masalah dari faktor tekanan perekonomian yang menurun sejak diterapkannya PSBB. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak peduli terhadap peraturan yang dibuat Pemerintahan Sumatera Barat, karena persepsi masyarakat lebih mendahulukan keberlangsungan hidup dari pada kesehatan.
3. Upaya Pemerintahan Sumatera Barat dalam penanganan Covid 19 sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan kesehatan tetapi juga memberi sanksi yang berat bagi pelanggar protokol kesehatan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Citra.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang perubahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini